

KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA BATULAYANG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhamad Ichsan¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi Pemerintah Desa Batulayang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan komunikasi, seperti penyebaran informasi pembangunan yang belum merata, komunikasi yang cenderung berlangsung satu arah, serta belum optimalnya mekanisme penyampaian aspirasi dan umpan balik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis penelitian didasarkan pada Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas yang mencakup dimensi kebenaran (truth), ketepatan (rightness), ketulusan (sincerity), dan keterpahaman (comprehensibility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang telah berjalan cukup baik melalui Musyawarah Desa, Musrenbangdes, sosialisasi program, komunikasi interpersonal, dan pemanfaatan berbagai media komunikasi. Komunikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya akses informasi, keterbatasan ruang dialog yang partisipatif, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi yang lebih dialogis, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Komunikasi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Desa Batulayang.

Abstract

This study aims to analyze the communication of the Batulayang Village Government in enhancing community participation in development activities in Batulayang Village, Cililin District, West Bandung Regency. The study was motivated by several communication-related issues, including the uneven dissemination of development information, the predominance of one-way communication, and the suboptimal

mechanisms for public aspirations and feedback. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The analysis was based on Jürgen Habermas's Theory of Communicative Action, which consists of the dimensions of truth, rightness, sincerity, and comprehensibility. The findings reveal that the communication practices of the Batulayang Village Government have generally been implemented effectively through Village Meetings (Musdes), Village Development Planning Meetings (Musrenbangdes), development program socialization, interpersonal communication, and the utilization of various communication media. These communication efforts have contributed to increasing community participation in the planning, implementation, and evaluation stages of village development. However, several challenges remain, including unequal access to information, limited participatory dialogue, and differences in the community's level of understanding regarding development information. Therefore, strengthening more dialogical, inclusive, and sustainable communication is necessary to further enhance community participation in village development.

Keywords: Government Communication, Community Participation, Village Development, Batulayang Village.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara demokratis, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat dimaknai sekadar sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan sebagai mekanisme esensial untuk membangun kepercayaan publik, mewujudkan transparansi, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Habermas dalam teori tindakan komunikatifnya menegaskan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan hadirnya ruang komunikasi publik yang bebas, setara, dan rasional, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kepentingannya tanpa dominasi pihak tertentu.

Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, desa menempati posisi strategis sebagai garda terdepan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi otonomi desa. Perubahan tersebut tidak hanya memperkuat kedudukan desa sebagai entitas otonom, tetapi juga memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun

per periode, sekaligus memperkuat perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan prinsip yang secara eksplisit diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan hak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Lebih jauh, Pasal 80 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan aktivitas fisik semata, melainkan proses kolektif yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Perhatian negara terhadap pembangunan desa juga tercermin dari besarnya alokasi Dana Desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71 triliun yang disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Anggaran sebesar ini semestinya menjadi modal utama percepatan pembangunan yang berakar pada aspirasi warga. Namun, besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi komunikasi pemerintah desa yang mampu menyerap kebutuhan masyarakat, menyampaikan program secara transparan, dan mengajak warga berpartisipasi aktif sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan kata lain, persoalan pembangunan desa hari ini bukan lagi semata soal ketersediaan anggaran, melainkan soal kualitas komunikasi yang menjembatani anggaran tersebut dengan kebutuhan riil masyarakat.

Persoalan komunikasi pemerintah desa ini semakin kompleks di era digital. Penelitian Muhlisin (2023) dalam *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* menemukan adanya kesenjangan komunikasi antargenerasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan komunikasi konvensional seperti pengumuman di masjid atau papan

informasi dinilai sudah tidak memadai untuk menjangkau warga muda yang lebih akrab dengan media digital, sementara warga lanjut usia justru kesulitan mengakses informasi pembangunan yang disampaikan melalui platform digital. Dualisme ini menciptakan fragmentasi informasi yang pada gilirannya menekan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Persoalan serupa turut ditemukan oleh Dewi (2021) yang meneliti komunikasi pemerintah desa di kawasan perbatasan Jawa Barat-Banten. Penelitian yang dipublikasikan dalam Media Nusantara ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih cenderung menggunakan pola komunikasi top-down dalam pengelolaan Dana Desa, di mana informasi mengalir searah dari pemerintah ke masyarakat tanpa ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberi masukan. Pola semacam ini berisiko menjauhkan program pembangunan dari kebutuhan riil warga sekaligus melemahkan rasa kepemilikan masyarakat atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sejumlah temuan lain justru menegaskan bahwa komunikasi pemerintah desa merupakan variabel kunci yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Muhlisin (2023) menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang efektif, mencakup komunikasi tatap muka melalui musyawarah, pemanfaatan media digital, dan pendekatan interpersonal berbasis kearifan lokal, berkorelasi signifikan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Priyanti (2024) dalam Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) turut menegaskan bahwa strategi komunikasi yang dialogis, inklusif, dan berbasis kebutuhan warga terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat satu arah atau instruktif. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak dikelola dengan baik, dampaknya nyata. Rery, Mustofa, Ahmad, dan Nahria (2024) dalam Jurnal Komunikatio mengungkapkan bahwa strategi komunikasi pemerintahan desa di berbagai wilayah belum berjalan maksimal dalam mendorong partisipasi, terutama karena kesenjangan akses informasi antargenerasi dan keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam memanfaatkan media komunikasi modern. Rangkaian temuan ini menunjukkan pola yang konsisten, komunikasi yang buruk menghasilkan partisipasi yang rendah, sementara

komunikasi yang dialogis dan inklusif berbanding lurus dengan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, persoalan ini juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni lebih dari 5.000 desa yang tersebar di berbagai kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara khusus menyoroti pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, sebuah pengakuan implisit bahwa kualitas komunikasi pemerintah desa merupakan faktor determinan keberhasilan pembangunan pedesaan. Penelitian Setiawan, Suwaryo, dan Rahmatunnisa (2020) dalam Jurnal Academia Praja menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bandung masih menghadapi kendala struktural, di antaranya keterbatasan akses informasi warga terhadap rencana pembangunan dan belum optimalnya mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian lanjutan Setiawan, Wulandari, dan Munawaroh (2024) mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung Barat, yang juga diterbitkan dalam Jurnal Academia Praja, turut mengidentifikasi komunikasi kelembagaan sebagai salah satu kapasitas yang masih perlu diperkuat. Kedua penelitian ini mengonfirmasi bahwa problem komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri di satu desa, melainkan bersifat sistemis dan kontekstual dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Sejalan dengan itu, penelitian Alvioni, Miradhia, dan Bonti (2022) tentang keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, yang dipublikasikan dalam JANE (Jurnal Administrasi Negara), menemukan bahwa mekanisme keterbukaan informasi di wilayah Bandung Barat, termasuk di tingkat pemerintah desa, masih perlu ditingkatkan secara substansial. Keterbukaan informasi yang belum optimal ini menjadi salah satu hambatan struktural dalam

membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warganya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun tidak berkembang secara maksimal.

Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu desa yang secara geopolitik berada dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat dengan karakteristik sosiodemografis yang beragam. Kabupaten Bandung Barat sendiri merupakan kabupaten yang relatif baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007, dengan luas wilayah sekitar 1.305 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa yang tersebar di 165 desa pada 16 kecamatan. Kecamatan Cililin, tempat Desa Batulayang berada, memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan dan kawasan pertanian yang turut memengaruhi aksesibilitas komunikasi antara pemerintah desa dan warganya. Kondisi topografis yang tidak sepenuhnya datar ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penyebaran informasi pembangunan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan yang relatif terpencil dari pusat desa.

Penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung, yang juga berada di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dan diterbitkan dalam Jurnal Caraka Prabu, mengidentifikasi bahwa persoalan utama di desa-desa Kecamatan Cililin terletak pada kurang optimalnya pemantauan pembangunan oleh kepala desa, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, serta minimnya sosialisasi program pembangunan oleh instansi terkait kepada warga. Temuan ini mengonfirmasi bahwa persoalan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Cililin bukan sekadar dugaan, melainkan fenomena nyata yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi warga dalam pembangunan desa, sehingga relevan dijadikan pijakan awal untuk mengkaji fenomena serupa di Desa Batulayang.

Pada level yang lebih luas, penelitian Delisa (2024) dalam Jurnal Tata Kota dan Daerah mengungkap bahwa keterkaitan modal sosial dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa

sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi institusional pemerintah desa. Desa yang pemerintahnya mampu membangun komunikasi berbasis kepercayaan dan keterbukaan cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, sementara desa yang komunikasi pemerintahnya bersifat formal dan prosedural semata cenderung mengalami kelesuan partisipasi, yang pada akhirnya berimbas pada hasil pembangunan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Desa Batulayang, sebagai desa yang berada di wilayah perbukitan dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan jasa, memiliki dinamika sosial yang khas, di mana pola komunikasi berbasis kekerabatan masih sangat dominan. Kondisi ini semestinya menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan pemerintah desa sebagai jalur komunikasi partisipatif, namun potensi tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara strategis.

Secara nasional, tingkat kemajuan dan kemandirian desa diukur pemerintah melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga dimensi, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang di dalamnya mencakup unsur modal sosial dan partisipasi warga, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), serta Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan (IKL). Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, setiap desa diklasifikasikan ke dalam lima status, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Pada tingkat kabupaten, performa Indeks Desa Membangun Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 0,8054 dengan status Maju pada tahun 2022, menempatkan Kabupaten Bandung Barat pada peringkat kedua se-Provinsi Jawa Barat, dengan capaian indeks ketahanan sosial sebesar 0,8846, indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,7543, dan indeks ketahanan ekologi sebesar 0,7770 (Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2022, sebagaimana dilaporkan Sindonews, 2023).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Batulayang, termasuk penuturan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah warga, ditemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan

komunikasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, terdapat variasi keterlibatan masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa, terlihat dari perbedaan tingkat kehadiran, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan warga dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Kedua, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat cenderung berlangsung satu arah, di mana informasi program dan kegiatan pembangunan umumnya disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat, sementara ruang dialog dan pertukaran gagasan belum sepenuhnya dimanfaatkan kedua belah pihak. Ketiga, sistem komunikasi partisipatif, baik melalui media digital maupun mekanisme umpan balik, belum berjalan optimal, sehingga masyarakat masih terbatas dalam menyampaikan aspirasi, kritik, atau saran secara berkelanjutan. Keempat, keterbukaan informasi pembangunan dan respons masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah desa masih menjadi bagian yang perlu diperkuat dalam mendukung proses pembangunan yang partisipatif.

Salah satu forum yang menjadi wadah utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yakni forum yang mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan. Melalui forum ini, masyarakat semestinya memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, usulan program, serta permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Namun, keberhasilan Musrenbangdes sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang berlangsung di dalamnya, yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berbicara, serta adanya umpan balik dari pemerintah desa terhadap aspirasi yang disampaikan. Sebaliknya, apabila komunikasi bersifat satu arah, masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa memiliki kesempatan memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan tujuan pembangunan partisipatif sulit terwujud.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Batulayang, pelaksanaan Musrenbangdes memang telah berjalan sebagai forum perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya sebagian masyarakat belum memperoleh informasi kegiatan pembangunan secara merata, komunikasi yang berlangsung masih cenderung satu arah, dan mekanisme komunikasi partisipatif yang memungkinkan masyarakat memberi masukan serta memperoleh umpan balik secara berkelanjutan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan pembangunan desa.

Fenomena tersebut relevan dianalisis melalui Teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Menurut Habermas, komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang berorientasi pada tercapainya pemahaman bersama melalui dialog yang rasional, terbuka, dan bebas dari dominasi. Dalam forum Musrenbangdes, pemerintah desa dan masyarakat idealnya memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan argumentasi mengenai pembangunan desa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak semata mencerminkan kepentingan pemerintah desa, melainkan hasil kesepakatan bersama. Namun, apabila komunikasi yang terjadi masih didominasi pihak tertentu dan kurang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, maka tujuan Musrenbangdes sebagai sarana partisipasi tidak akan tercapai secara optimal.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 semakin menegaskan urgensi persoalan ini. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun menuntut mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel, agar pemerintah desa tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam jangka waktu kepemimpinan yang lebih panjang. Dengan demikian, kajian mengenai bagaimana komunikasi Pemerintah Desa Batulayang berlangsung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pembangunan menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami pola komunikasi yang digunakan,

hambatan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan menggali secara mendalam bagaimana pola komunikasi pemerintah desa dijalankan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap komunikasi tersebut, serta bagaimana komunikasi tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan interaksi dan pengalaman masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi angka semata.

Berdasarkan) temuan fenomena masalah yang terjadi di lapangan,) peneliti) membuat) penelitian) dengan) judul “Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian—seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan—secara holistik dan dengan deskripsi mendalam dalam bentuk narasi verbal pada suatu konteks sosial yang alamiah.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive (sengaja), yang terdiri dari unsur perangkat Pemerintah Desa Batulayang (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan kasi pelayanan/pembangunan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dan perwakilan warga Desa Batulayang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Observasi Partisipatif: Mengamati langsung kondisi lingkungan sosial serta jalannya kegiatan musyawarah dan interaksi antara aparat desa dan masyarakat.

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Menggali informasi secara rinci dan terbuka menggunakan pedoman wawancara kepada para informan kunci.

Studi Dokumentasi: Menelaah dokumen resmi desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), notulen rapat Musrenbangdes, serta arsip laporan kegiatan pembangunan.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan utama: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai komunikasi Pemerintah Desa Batulayang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena komunikasi yang belum berjalan secara optimal dalam proses pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti belum meratanya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, komunikasi yang masih cenderung berlangsung satu arah, belum optimalnya mekanisme penyampaian aspirasi dan umpan balik, serta masih rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, komunikasi pemerintah desa dianalisis menggunakan Teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang mampu menghasilkan kesepakatan bersama melalui dialog yang rasional, terbuka, dan bebas dari dominasi. Habermas menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi dapat dilihat melalui empat

klaim validitas komunikasi, yaitu kebenaran (truth), ketepatan atau kesesuaian norma (rightness), ketulusan (sincerity), dan keterpahaman (comprehensibility). Keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana komunikasi Pemerintah Desa Batulayang berlangsung dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa Pemerintah Desa Batulayang telah melaksanakan berbagai bentuk komunikasi dengan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sosialisasi program pembangunan, komunikasi interpersonal antara aparatur desa dengan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan, serta penggunaan media komunikasi yang tersedia di lingkungan desa. Berbagai bentuk komunikasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menciptakan ruang partisipasi dalam proses pembangunan. Akan tetapi, efektivitas komunikasi yang dilakukan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Dilihat dari dimensi truth (kebenaran), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Informasi yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan program pembangunan, prioritas pembangunan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui forum musyawarah maupun kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhi unsur kebenaran dalam komunikasi dengan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi pembangunan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mengaku

terlambat memperoleh informasi atau bahkan tidak mengetahui secara detail mengenai program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebenaran informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sebenarnya telah terpenuhi, namun distribusi informasi tersebut belum sepenuhnya merata. Akibatnya, muncul perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Dalam perspektif Habermas, komunikasi yang benar tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang sesuai dengan realitas, tetapi juga harus dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pemerataan akses informasi agar seluruh masyarakat memperoleh informasi yang sama mengenai pembangunan desa.

Pada dimensi rightness (ketepatan atau kesesuaian norma), hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan Musrenbangdes menjadi salah satu bentuk komunikasi partisipatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, kritik, maupun saran terkait pembangunan desa. Forum tersebut menjadi wadah resmi yang mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberadaan Musrenbangdes menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam forum tersebut. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan tanpa memberikan masukan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah desa telah menjalankan mekanisme komunikasi yang sesuai dengan aturan, namun dari sisi partisipasi masih diperlukan

upaya yang lebih intensif untuk mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada tersedianya forum komunikasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan suasana yang mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Selanjutnya pada dimensi sincerity (ketulusan), hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya Pemerintah Desa Batulayang berupaya membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga berusaha mendengarkan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sikap keterbukaan tersebut terlihat dari adanya komunikasi langsung antara aparaturnya desa dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan formal maupun informal. Melalui komunikasi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Ketulusan dalam komunikasi menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai pemerintah desa cukup terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat harapan dari masyarakat agar setiap aspirasi yang disampaikan memperoleh tindak lanjut dan umpan balik yang lebih jelas. Ketika usulan masyarakat belum direalisasikan atau tidak memperoleh penjelasan yang memadai, muncul persepsi bahwa aspirasi yang telah disampaikan kurang mendapatkan perhatian. Dalam konteks teori Habermas, ketulusan tidak hanya ditunjukkan melalui kesediaan mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga melalui konsistensi antara apa yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme umpan balik agar masyarakat mengetahui perkembangan dari setiap usulan yang telah disampaikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terus meningkat.

Sementara itu, pada dimensi comprehensibility (keterpahaman), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa, rapat warga, sosialisasi, komunikasi langsung, papan informasi, serta media komunikasi lainnya yang tersedia di lingkungan desa. Penggunaan berbagai saluran komunikasi tersebut bertujuan agar informasi pembangunan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan masih berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, usia, kesibukan masyarakat, serta akses terhadap informasi yang tersedia. Sebagian masyarakat memahami dengan baik informasi yang disampaikan pemerintah desa karena aktif mengikuti kegiatan musyawarah dan sosialisasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh dan memahami informasi pembangunan karena jarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa keterpahaman menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan komunikasi pemerintah desa. Informasi yang benar, terbuka, dan sesuai aturan tidak akan memberikan dampak yang maksimal apabila tidak dipahami oleh masyarakat sebagai penerima pesan.

Berdasarkan pembahasan terhadap keempat dimensi komunikasi tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Komunikasi yang dilakukan pemerintah desa mampu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, memberikan masukan terhadap program pembangunan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemerataan informasi, kualitas umpan balik terhadap aspirasi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan pola komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat Teori Tindakan Komunikatif Habermas yang menyatakan bahwa komunikasi yang didasarkan pada kebenaran, ketepatan, ketulusan, dan keterpahaman akan menghasilkan kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kesepahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan lebih terdorong untuk terlibat dalam pembangunan ketika mereka merasa memperoleh informasi yang jelas, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, didengarkan aspirasinya, serta memahami tujuan dan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Batulayang, maka semakin besar pula peluang meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Hal tersebut terlihat dari berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa, baik melalui komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi maupun komunikasi digital. Melalui berbagai bentuk komunikasi tersebut, pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi pembangunan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Ditinjau dari dimensi komunikasi Habermas, yaitu truth (kebenaran), rightness (ketepatan), sincerity (ketulusan), dan comprehensibility (keterpahaman), secara umum komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa Batulayang telah berjalan cukup baik. Informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di desa sehingga memenuhi unsur kebenaran. Selain itu, komunikasi juga dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, terutama melalui forum Musyawarah Desa dan Musrenbangdes yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Pada aspek ketulusan, pemerintah desa menunjukkan keterbukaan dalam menerima berbagai aspirasi, masukan, dan kritik dari masyarakat. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sementara itu, pada aspek keterpahaman, pemerintah desa telah berupaya menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi agar informasi pembangunan dapat dipahami oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya penyebaran informasi, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, serta keterbatasan partisipasi sebagian masyarakat dalam forum pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batulayang, maka semakin besar pula peluang meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi tersebut terlihat dalam keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesepahaman, kepercayaan, serta kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai komunikasi Pemerintah Desa Batulayang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesepahaman, kepercayaan, serta kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas melalui empat klaim validitas komunikasi, yaitu klaim kebenaran, klaim ketulusan, klaim keterpahaman, dan klaim kewajaran normatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi klaim kebenaran, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Batulayang telah berupaya menyampaikan informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui berbagai media komunikasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pertemuan warga, papan informasi desa, maupun media komunikasi digital. Informasi yang disampaikan pada dasarnya telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat memperoleh gambaran mengenai arah pembangunan desa. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masih terdapat masyarakat yang mengaku terlambat menerima informasi ataupun belum memahami secara utuh mengenai program pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek penyampaian informasi masih memerlukan peningkatan agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama terhadap informasi publik.

Selanjutnya, pada dimensi klaim ketulusan, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya membangun komunikasi yang terbuka melalui sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai forum pembangunan. Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemerintahan yang partisipatif. Akan tetapi, dalam praktiknya komunikasi yang berlangsung masih cenderung didominasi oleh penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik, maupun masukan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga proses komunikasi belum sepenuhnya mencerminkan komunikasi dua arah yang setara sebagaimana dikemukakan dalam teori tindakan komunikatif Habermas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memandang bahwa ruang dialog yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pada dimensi klaim keterpahaman, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menggunakan bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipahami dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi langsung maupun media komunikasi yang umum digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masyarakat, seperti tingkat pendidikan, usia, kondisi geografis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia maupun masyarakat yang tinggal di wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan desa, masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa masih perlu mengembangkan variasi media komunikasi yang lebih inklusif sehingga informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selanjutnya, berdasarkan dimensi klaim kewajaran normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, serta budaya masyarakat Desa Batulayang yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah

menyediakan forum Musrenbangdes sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing. Kehadiran forum tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip demokrasi partisipatif di tingkat desa. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih belum merata. Tidak semua kelompok masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan dialog masih perlu terus diperkuat agar seluruh unsur masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui penyampaian aspirasi, keikutsertaan dalam musyawarah, maupun partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong. Namun demikian, komunikasi yang berlangsung masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum meratanya penyebaran informasi, keterbatasan ruang dialog yang benar-benar partisipatif, perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi digital sebagai sarana komunikasi publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah desa merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Semakin terbuka, transparan, dialogis, inklusif, dan partisipatif komunikasi yang dibangun pemerintah desa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Sebaliknya, apabila komunikasi masih didominasi oleh penyampaian informasi secara satu arah, maka partisipasi masyarakat cenderung terbatas pada kehadiran dalam forum tanpa disertai keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan

maupun pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi partisipatif perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Desa Batulayang dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widjaja, H. A. T. (2018). *Otonomi Desa yang Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.